

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Periode dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Periode Penelitian**

Penelitian ini bersifat komparatif yang bermaksud menganalisis perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum UU PDRD berlaku (mengacu UU 34 tahun 2000, PP 65 dan PP 66 tahun 2001) dan dalam periode waktu sesudah UU diberlakukan yang mengacu UU 28 tahun 2009 di Kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan periode waktu 2005 - 2014.

Tahun efektif berlaku UU No. 28 tahun 2009 PDRD tiap - tiap Kabupaten/kota berbeda-beda. Dengan rincian meliputi:

1. Kota Yogyakarta sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2006-2009, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2010-2013.
2. Kabupaten Sleman sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2006-2009, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2010-2013.
3. Kabupaten Kabupaten Bantul sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2006-2009, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2010-2013.

4. Kabupaten Kulonprogo sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2007-2010, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2011-2014.
5. Kabupaten Gunungkidul sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2007-2010, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2011-2014.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dipilih oleh peneliti yang digunakan sebagai sumber data dan informasi adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi DIY dan kantor Badan Pusat Statistik di Provinsi DIY.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian Kabupaten/kota di Provinsi DIY, karena semua Kabupaten/kota di Provinsi DIY sudah memiliki Perda dan telah melakukan pemungutan PAD sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD Tahun 2009. Sehingga data penelitian ini dapat terpenuhi dan dianalisis secara menyeluruh dari tahun 2005-2014.

## **B. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diambil dari Dinas Pendapatan dan BPS Provinsi DIY Tahun 2005-2014. Data-data sekunder yang diambil meliputi :

1. Data total Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 di Kabupaten/kota Provinsi DIY yaitu tahun 2005-2014.
2. Data komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 di Kabupaten/kota Provinsi DIY yaitu tahun 2005-2014 atau data disesuaikan dengan periode waktu sebelum UU PDRD diberlakukan dan dalam periode waktu sesudah UU diberlakukan oleh masing-masing kabupaten/kota, yaitu komponen a) Pajak Daerah, dan b) Retribusi Daerah.

Data sekunder bersumber dari laporan realisasi PAD Kabupaten/kota Provinsi DIY Tahun 2005-2014 yang nantinya diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah atau BPS Provinsi DIY yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

### C. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PDRD di Provinsi DIY. Semakin besar kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan Daerah maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat Mardiasmo (2009).

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 (PDRD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum UU PDRD diberlakukan berdasarkan pemberlakuan UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) di Kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah pendapatan yang terdiri dari hasil pajak Daerah/*local tax*, retribusi Daerah/*local retribution*, pendapatan dari laba perusahaan Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah sebelum UU PDRD diberlakukan. Distribusi yang merupakan bagian dari pajak Pusat sebesar 64% untuk PBB, dan BPHTB sebesar 64,8% yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota Provinsi DIY dengan periode waktu sebelum UU atas PDRD diberlakukan oleh masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul di tahun 2010, sedangkan Kulonprogo dan Gunungkidul di tahun 2011.

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 (PDRD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah UU PDRD diberlakukan berdasarkan pemberlakuan UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) di Kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah pendapatan yang terdiri dari hasil pajak Daerah/*local tax*, retribusi Daerah/*local retribution*, pendapatan dari laba perusahaan Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah setelah UU PDRD diberlakukan. Setelah diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 sudah tidak ada bagian yang diberikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, karena PBB dan juga BPHTB sudah 100% diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya UU 28 tahun 2009, maka Pemda Kabupaten/kota Provinsi DIY memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal baru yang menjadi sumber PAD. Kemudian Pemda Kabupaten/kota Provinsi DIY memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan sumber-sumber PAD perubahan yang tercantum dalam Perda masing-masing Kabupaten/kota Provinsi DIY guna meningkatkan penerimaan PAD dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi DIY. Semakin besar kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan Daerah maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat (Mardiasmo (2009)). Rumus menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pengukuran Variabel PAD = PBB-P2 + BPHTB + Pajak Daerah lainnya + retribusi Daerah + hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah.

#### **D. Metode Analisis Data**

##### **1. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi variabel penelitian yang menggambarkan jawaban dalam bentuk nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi atas variabel penelitian yang dalam penelitian ini adalah Total PAD sebelum dan sesudah UU PDRD berlaku, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum dan sesudah UU PDRD berlaku.

##### **2. Analisis Statistik**

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata berpasangan (*paired sample t-test*). *Paired sampel t-test* digunakan untuk menguji beda rata-rata berpasangan antara dua sampel dan untuk pengujian parametrik Hartono (2012). Pengujian-*t* dilakukan apabila data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Apabila data tidak terdistribusi secara normal maka pengujian yang dilakukan menggunakan statistik non parametrik *Wilcoxon signed rank test*.

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel penelitian ini mempunyai distribusi normal atau tidak. Model data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal Ghazali (2001). Untuk menguji normalitas, dapat dilakukan dengan menganalisis nilai probabilitasnya. Asumsi normalitas dengan dasar pengambilan keputusan adalah, jika nilai probabilitas  $> 0,05$  dan sebaliknya. Jika nilai probabilitas  $\leq 0,05$ , maka data Total PAD, pajak Daerah, dan retribusi Daerah sebelum dan sesudah UU PDRD tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **b. Uji Hipotesis**

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis *Paired Sample t Test*. *Paired Sample t Test* digunakan untuk menganalisis dan menguji hipotesis data berpasangan. Dalam penelitian ini dan tingkat signifikansi yang digunakan 5%. Pengujian hipotesis menggunakan uji t (*t-test*) untuk membuktikan perbedaan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota sebelum UU PDRD diterapkan dan sesudah UU PDRD diterapkan berdasarkan pemberlakuan UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) di Kabupaten/kota di Provinsi DIY maupun perbandingan secara keseluruhan Kabupaten/kota di Provinsi DIY sebelum UU PDRD diterapkan dan sesudah UU PDRD diterapkan berdasarkan pemberlakuan UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) di Kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Hipotesis diuji dari hasil *Paired Sample t Test* yang diolah menggunakan program *SPSS for Windows* dengan membandingkan tingkat

signifikansi  $\alpha = 5\%$  Sugiyono (2010). Apabila tingkat sig.  $t < \alpha = 5\%$ , maka hipotesis penelitian diterima, artinya terdapat perbedaan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota maupun secara keseluruhan Kabupaten/kota di Provinsi DIY sebelum UU PDRD diterapkan dan sesudah UU PDRD diterapkan berdasarkan pemberlakuan UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) di Kabupaten/kota di Provinsi DIY.

